

GLEMBUK, STRATEGI POLITIK DALAM REKRUTMEN ELITE PENGUASA DI DESA PULUNGSARI YOGYAKARTA

*Bambang Hidayana**

ABSTRACT

Credibility is the power resource of village elites in Java that has ability to find out influence to the people. However, village elites also still require glembuk as a strategy to generate credibility, or to make the people merely under their control even though without legitimacy. Glembuk is implemented through conducting political transaction between the elites and the peoples, the elites persuade and negotiate their interest, and offer a compensation in term of services, goods, money or something that is important, or valuable for the peoples. Elites become to rely more on glembuk in the contestation of ruling elite recruitment such as village staff (pamong) and headman (lurah) direct election because they have no sufficient credibility requirement. The winners are the elites enabling to produce glembuk that manipulate and show off their potential as the credible leaders.

Keywords: glembuk, village elites, recruitment

ABSTRAK

Kredibilitas merupakan sumber daya kuasa elite desa di Jawa yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan pengaruh ke warga. Namun demikian, elite desa masih juga membutuhkan *glembuk* sebagai suatu strategi untuk menghasilkan kredibilitas, atau membuat orang di bawah kontrolnya semata sekalipun tanpa legitimasi. *Glembuk* diimplementasikan dengan melakukan transaksi politik antara elite dengan warga, yaitu elite membujuk dan menegosiasikan kepentingannya dan menawarkan suatu kompensasi dalam bentuk jasa, barang, uang, sesuatu yang penting atau bernilai bagi warga. Elite menjadi lebih bergantung pada *glembuk* dalam persaingan rekrutmen elite penguasa, seperti pemilihan langsung aparat desa (*pamong*) dan kepala desa (*lurah*), karena umumnya tidak memiliki persyaratan kredibilitas yang memadai. Pemenangnya adalah para elite yang dapat melakukan *glembuk* untuk merekrut dan memamerkan potensi dirinya sebagai calon pemimpin yang kredibel.

Kata Kunci: *glembuk*, elite desa, rekrutmen

PENGANTAR

Berbagai deskripsi relasi kuasa di desa Jawa pada masa reformasi dapat menimbulkan wacana yang saling berseberangan mengenai kuat

lemahnya posisi elite desa di hadapan warganya. Beberapa studi memberikan gambaran bahwa reformasi dan otonomi desa sejak 1998 – sekarang tidak meruntuhkan supremasi elite desa

* Staf Pengajar Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

dalam relasi politik. Hal ini terlihat dari studi White dan Aji (2001); Latief (2003), dan Cahyono dkk. (2005) yang tetap melihat bahwa dinamika persaingan dan konflik kekuasaan di desa bersifat elitis, bukan warga melawan elite. Sebaliknya, muncul pula pandangan yang melihat bahwa supremasi elite terkikis dan warga justru mampu mengontrol para pejabat desa, seperti munculnya protes dan forum warga (*citizen forum*) (Antlov, 2003:82) dan terlaksananya pemilihan lurah dan BPD (Badan Perwakilan Desa) secara partisipatif (Budijanto, 2001:97).

Surat kabar daerah dan nasional juga menyajikan berita menguatnya posisi warga sehingga menyebar menjadi wacana di publik. Pertama, berita demonstrasi warga guna melawan atau melengserkan elite desa agar bersih dari tindak KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) (*Bernas*, 14 Juli 2000; *Tempo Interaktif*, 14 November 2006). Kedua, berita meningkatnya kontrol warga atas pelayanan publik melalui protes, dialog, demonstrasi, dan aksi kekerasan (*Bernas*, 12 Februari 2001; *Jawa Pos*, 24 Januari 2003; *Kompas*, 8 Januari 2004). Ketiga, merebaknya berita tentang tekanan warga atas proses rekrutmen pamong yang elitis dan berjalan tidak demokratis (*Kedaulatan Rakyat*, April-Juni 2002).

Ketidakjelasan posisi elite dan warga dalam relasi kuasa di atas menggiring artikel ini untuk mencermati basis kuasa yang penting bagi elite dalam melakukan persaingan politik. Umumnya, studi relasi kuasa di desa Jawa cenderung menggunakan teori elitis, artinya mengkonsepsikan bahwa elite kuat posisinya karena mengontrol seluruh sumber daya politik, praktik persaingan politik di desa dan menjadi bagian dari klien elite supradesa (Smith, 1984; Tjiptoherijanto dan Yumiko, 1985; Cederroth, 1994; Maurer, 1996; Antlov, 2002). Dengan menggunakan patronase, elite juga dapat mengendalikan warga untuk mendukung kekuasaannya (Husken, 1998). Pandangan yang elitis itu sesuai dengan Marx Weber (1968) yang memandang bahwa basis kuasa merujuk pada otoritas, baik otoritas legal-rasional, seperti kewenangan yang melekat pada jabatan dalam organisasi pemerintahan, maupun

otoritas tradisional yang bersumber dari adat dan karisma. Sementara itu, beberapa peneliti juga mengikuti aliran Benedict Anderson (1972) yang secara khusus menjelaskan kekhasan paham kuasa di Jawa (Moedjanto, 1985; Ali, 1986). Anderson (1972:6) memandang bahwa kuasa tersebut bersifat tetap, tidak berubah, bukan hasil dari interaksi politik dan tidak memerlukan legitimasi. Sebaliknya, artikel ini menegaskan bahwa sumber kuasa yang penting bagi elite desa di Jawa adalah kredibilitas dan elite bergantung pada *glembuk*, yaitu strategi politik lokal yang persuasif dan negosiatif yang berguna untuk meraih kredibilitas atau memanipulasinya demi meraih kuasa sekalipun tanpa legitimasi warga. Dengan bergantung pada dua kekuatan tersebut, posisi elite dalam transaksi politik tidak selalu serba kuasa karena kedua basis kuasa itu ditawarkan kepada warga dan warga memiliki potensi untuk menolak dan mendeligitimasi elite yang tidak kredibel.

Dalam menyimak pentingnya kredibilitas dan *glembuk* sebagai kekuatan elite, artikel ini menyajikan data dan analisis penelitian di Desa Pulungsari, Yogyakarta, tentang rekrutmen pamong dan kepala desa pada era reformasi yang dipaparkan secara kronologis. Rekrutmen tersebut merupakan arena politik yang berguna untuk memahami pentingnya *glembuk* dalam relasi kuasa di desa. Artikel ini menyajikan profil elite dan warga desa, diikuti konsep tentang kredibilitas dan *glembuk*, dan dilanjutkan penggunaan *glembuk* dalam rekrutmen pejabat desa.

ELITE DAN WARGA DESA

Desa Pulungsari berada di wilayah Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Penduduk terstratifikasi ke dalam golongan elite dan warga. Pada tahun 2007, jumlah penduduk dewasa dan menikah mencapai sekitar 9.700 orang. Penduduk ini terdiri atas sekitar 200 orang golongan elite dan 9.500 golongan warga. Golongan elite meliputi 48 orang politisi, baik yang duduk sebagai pengurus partai di tingkat kabupaten, anggota dewan maupun kader; 30 orang pejabat desa; 24 orang peng-

usaha; serta sisanya adalah kelas menengah, seperti pengusaha, PNS, dan pegawai swasta. Secara ekonomi, elite desa itu merupakan lapisan menengah ke atas yang memegang atau memperebutkan jabatan politik dalam pemerintahan. Umumnya, elite desa mencari pengaruh di desa dengan aktif atau bergabung dengan organisasi massa, terutama Nahdatul Ulama. Sebagian besar elite desa juga berjejer dengan para politisi dan birokrat di kabupaten. Sementara itu, para elite desa yang populis menjadi pengurus organisasi kemanusiaan, seperti yatim piatu. Golongan elite yang sangat berpengaruh adalah pamong (termasuk lurah). Umumnya, pamong merupakan keturunan atau menantu pamong generasi tempo dulu.

Berbeda dengan elite, umumnya warga merupakan lapisan ekonomi bawah yang bekerja sebagai perajin kecil, petani, buruh tani, dan buruh pabrik di kota. Kelompok warga meliputi tokoh warga yang berperan sebagai *primus inter pares* dan basis ekonominya sama seperti para warga, tetapi relatif lebih mapan. Para tokoh warga merupakan orang kepercayaan warga yang sering berperan sebagai patron dalam mencari nafkah dan mengakses kebijakan pemerintah dan pembangunan desa. Para tokoh warga juga duduk sebagai pengurus RT (rukun tetangga) dan bersama warga mengembangkan RT guna melayani kebutuhan bersama dalam komunitas.

Dalam memperebutkan dukungan politik warga untuk meraih jabatan di pemerintahan desa, elite hampir tidak menggunakan kekuatan patronase tradisional. Hal ini karena basis material elite bukan lagi pada tanah. Tanah bengkok dana kas desa juga relatif tidak memadai untuk membangun patronase dengan buruh tani secara massal. Umumnya, sumber penghasilan elite justru berasal dari pekerjaan *nonfarm* dan bagi pamong adalah jabatan yang disandangnya. Para elite juga tidak dapat mengandalkan perannya dalam partai, organisasi massa, dan organisasi sosial karena dalam organisasi itu tidak mengakar dalam kehidupan di dalam komunitas warga. Sementara itu, warga dan para tokoh warga di komunitas RT dan dusun berusaha mengontrol tindakan para elitnya. Akibatnya, relasi kuasa

elite dan warga sarat dengan persaingan. Di satu sisi, para elite berusaha menguasai sumber daya politik dengan menjinakkan warganya, tetapi di sisi warga berusaha keluar dari hegemoni dan mendorong munculnya elite yang populis sehingga isu kredibilitas menjadi tema penting dalam diskusi berikut ini.

KREDIBILITAS

Kredibilitas dapat diartikan sebagai kelayakan dapat dipercaya dan keahlian memperoleh kepercayaan. Kredibilitas itu muncul dalam konteks relasi kuasa antara elite dengan warga sehingga bentuknya bukan hanya standar kelayakan elite menjadi pemimpin, melainkan juga berbagai strategi elite untuk meraih kelayakan sebagai pemimpin di mata warga. Kredibilitas diperlukan bagi elite karena otoritas formal belum tentu efektif untuk mengontrol warga dan yang efektif adalah kredibilitas yang menghasilkan keabsahan sebagai pemimpin di mata warga.

Beberapa studi tentang kredibilitas elite politik mengungkapkan adanya standar kelayakan elite dapat dipercaya sebagai pemimpin. Pertama, ada tidaknya *credibility gap*, yaitu konsistensinya dalam memenuhi janji politiknya (Wikipedia, 2010:1). Pemimpin akan jatuh kredibilitasnya jika tidak melaksanakan janji politiknya yang disampaikan ketika berkompetisi untuk meraih jabatan, berubah sikap politik atau tingkah lakunya yang bertentangan dengan kepentingan warga. Kedua, kredibilitas tergantung pada kemampuan memperhatikan kepentingan warga; bila bertindak populis, akan memperoleh kredibilitas. Ketiga, kredibilitas pemimpin terkait dengan kemampuan menjalankan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi (Tachino, 2009:2). Keempat, kredibilitas tergantung pada kemampuan pemimpin dalam membangun pemerintahan yang akuntabel dan transparan (Olofsgård, 2001: 23). Kelima, kredibilitas juga bergantung pada ada tidaknya sifat keteladanan pada diri pribadi elite, seperti jujur, dermawan, reformis, dan sebagainya (Taven, 2006:2). Karakteristik pribadi seperti itu merupakan sesuatu yang bernilai dalam masyarakat yang dapat mengangkat seseorang sebagai tokoh yang memiliki

kemampuan dipercaya (*believability*) dan disukai (*likeability*). Keenam, kredibilitas bergantung pada kemampuan pemimpin menekan dan mengatasi krisis ekonomi (Menon, 2007:1). Ketujuh, kredibilitas terkait dengan besar kecilnya dukungan publik atas kebijakan yang dibuat; semakin besar memperoleh dukungan biasanya semakin kredibel.

Di Desa Pulungsari, semua temuan studi tentang kredibilitas itu hidup juga dalam praktik politik. Pada prinsipnya, orang Pulungsari sepakat bahwa elite yang diakui memiliki kredibilitas adalah yang konsekuen dengan janjinya, *ajur-ajer* (dapat merangkul semua golongan), memiliki keteladanan, dapat menjadi pelindung dan mengatasi krisis dalam masyarakat, dan bersih dari KKN. Ketika eforia reformasi bergulir tahun 1998, ratusan pejabat desa, seperti kepala desa dan carik, dilengserkan oleh warga karena dinilai dan terbukti telah melakukan praktik KKN (D & R, 18 Juli 1998). Warga Pulungsari juga berhasil menjatuhkan carik desa yang korupsi sertifikasi tanah warga dengan cara menggalang demonstrasi massal secara terorganisasi pada tanggal 1 Juni 1998. Keberhasilan warga Pulungsari melengserkan carik desa itu diawali dengan membentuk tim reformasi desa yang dikenal dengan nama FOKUS dan dalam perjalanannya FOKUS menjadi forum untuk mengontrol kinerja demokrasi dan praktik korupsi desa. Dengan demikian, makna kredibilitas elite di Pulungsari sejalan dengan konsep Tachino (2009:2), yaitu diukur dari kepemimpinan yang bersih dari tindak korupsi.

Warga Pulungsari juga berusaha memiliki wakil dalam BPD yang kredibel dalam arti memiliki keteladanan sebagaimana dikonsepiskan oleh Taven (2006:2). Hal ini terlihat dari hasil pemilihan langsung anggota BPD tahun 2001. BPD menjadi lembaga yang memiliki kuasa yang besar karena mempunyai kewenangan dalam penyusunan peraturan desa, penganggaran, dan pengawasan. Aspirasi para tokoh warga adalah setiap dusun memiliki satu orang wakil yang duduk dalam BPD dan karena di desa ada 16 dusun, sebaiknya ada 16 orang wakil. Akan tetapi,

berdasarkan Perda Bantul, jumlah anggota BPD maksimal 13 orang sesuai dengan jumlah pemilihan.

Para tokoh warga bersatu mencalonkan orang kepercayaan menjadi anggota BPD dari golongannya sendiri daripada elite yang dianggap kurang mendengarkan aspirasi warga dalam kehidupan berkomunitas. Fakta mengungkapkan bahwa warga mampu mengunggulkan wakilnya karena dari 18 orang calon anggota BPD, 13 orang adalah tokoh warga dan hanya 5 orang calon elite desa. Hasil pemilihan mencatat bahwa empat elite desa itu gagal meraih kemenangan karena rendah kredibilitasnya di mata warga. Hal ini dilukiskan dari kekalahan Asmuni. Gelar sebagai kyai dan tokoh PKB bukan jaminan bagi Asmuni untuk meraih kemenangan. Ia berhasil melobi para tokoh warga agar mau mendukung pencalonnya setelah gagal menentukan calon tunggal dari Dusun Kayumanis. Rahman yang diunggulkan warga ternyata enggan masuk bursa calon karena lebih suka bekerja merantau bersama tetangga sebagai tukang bangunan. Akan tetapi, para pemuda enggan mendukung Asmuni yang dikenal sebagai kyai materialistis dan kurang bergaul dengan pemuda masjid dan kikir sebagai donatur. Akibatnya, para pemuda justru mendukung jago dari dusun lain agar Asmuni kalah.

Cerita kekalahan Asmuni menunjukkan bahwa kredibilitas merupakan syarat awal untuk meraih kekuasaan. Dalam praktik politik, syarat itu sering diabaikan elite dan elite justru menampilkan aksi *glembuk*. Elite yang sudah kredibel pun perlu melakukan aksi *glembuk* guna mendapatkan pengaruh yang kuat di hadapan warga. Oleh karena itu, perlu memahami kekuatan dan praktik penggunaan *glembuk* oleh para elite desa dalam memperebutkan jabatan.

GLEMBUK

Secara harafiah *glembuk* berarti *ngojok-ojoki supaya gelem* (membujuk supaya terpikat) atau *ngapusi* (menipu) (Widodo, 2007:246). Membujuk supaya lawan terpikat merupakan kata lain dari strategi politik *glembuk*. Bujukan ini dapat mengangkat kredibilitas, kalau mengindahkan

kepentingan lawan, tetapi hanya akan meraih dukungan semu atau resistensi bila mencederai kepentingan lawannya (*ngapusi*).

Konsep *glembuk* dan substansinya hidup dalam pandangan dan praktik politik orang Pulungsari. Para informan mengungkapkan, misalnya, "Sutan Agung dan orang Mataram dapat berkuasa di tanah Jawa karena menggunakan kekuatan *glembuk*. Mereka menggambarkan pengertian *glembuk* dengan cara merujuk cerita dalam kethoprak yang mengisahkan kemenangan Sultan Agung, para priyayi, dan pemimpin desa dalam menundukkan lawan atau memerintah bawahan atau orang kecil dengan cara halus. Menurut mereka, ciri dari *glembuk* adalah bermain halus, dalam arti musuh, bawahan atau orang kecil didorong menerima transaksi politik yang ditawarkan tanpa pemaksaan sehingga menerima karena memperoleh keuntungan tertentu apakah dalam jabatan, jasa atau barang. Bagi mereka, watak orang Yogyakarta adalah mudah terlena kalau dibuai dengan kesenangan, perhatian, atau didekati dengan cara tersamar baru kemudian dijebak untuk menerima kekalahan atas transaksi politik yang ditawarkan.

Dalam pandangan orang Pulungsari, karena para pemimpin di wilayah Mataram sering menggunakan *glembuk* dan karena *glembuk* menjadi andalannya, kemudian dikenal sebutan *glembuk* Mataram; dibedakan dengan orang Solo yang mengandalkan kekuatan *umuk* (sombong) dan orang Semarang pada kekuatan *getak* (gertak Semarang). Kalau *glembuk* ditampilkan dengan cara bersikap mengalah, rendah hati, sopan, menonjolkan niat baik, *umuk* ditampilkan dengan memamerkan kelebihan harta, pangkat derajat, kebaikan, guna memancing lawan mau mengalah karena posisinya lemah, bergantung dan membutuhkan kebaikan darinya. Adapun *getak* ditampilkan dengan cara memprovokasi lawannya agar ketakutan dengan cara ditekan dengan menggunakan kekuatan fisik atau nonfisik sehingga mengalah.

Dari cerita para informan, *glembuk* dipahami sebagai strategi politik elite, seperti raja, priyayi, lurah, dan pamong yang menjadi kelompok sasaran adalah bawahan atau orang kecil.

Mereka percaya bahwa *glembuk* menjadi alatnya para pemimpin untuk menjalankan perintahnya. Hanya dengan menggunakan kata-kata yang persuasif dan menjawab kebutuhan warga, warga akan terpikat dan menjalankan perintahnya. Misalnya pamong akan mengatakan "Apakah jalan kita ingin beraspal?". Pertanyaan itu dijawab warga "ya", dan pamong melanjutkan "pasti dapat, tapi kita mau enggak *nyoblos* (memilih) Golkar", dan warga menjawab "Ya tidak apa-apa, demi kampung kita".

Sebagai pengetahuan lokal, *glembuk* mengandung tiga elemen. Pertama, *glembuk* sebagai aturan main yang normatif dalam menyampaikan kepentingan politik. Norma itu meliputi keharusan bertindak sopan, mendengarkan kepentingan lawan, dan memberikan semacam kompensasi sekecil apa pun. Kedua, *glembuk* sebagai alat untuk mendapatkan kepercayaan sebagai calon atau pemimpin yang baik. Misalnya, warga menyikapi sebagai niat baik calon lurah untuk memajukan RT dengan memberikan bantuan setelah memenangkan pemilihan. Dalam pandangan orang Pulungsari, tindakan lurah tersebut disebut *glembuk* baik yang mengangkat kredibilitasnya. Ketiga, *glembuk* sebagai alat untuk menaklukkan atau mengeksploitasi musuh, bawahan atau warga. *Glembuk* ini disebut kasar atau buruk (*elek*). Dalam makna kasar terkandung perbuatan yang tidak terpuji, dalam hal ini menampilkan sikap arogan atau sombong, bermain nakal seperti curang atau melakukan setengah pemaksaan dan arahnya adalah untuk memaksimalkan keuntungan terhadap lawan. *Glembuk* kasar itu juga dapat mengabaikan norma *glembuk* dan dipraktikkan dengan menggunakan cara *umuk* Solo atau *getak* Semarang.

GLEMBUK DALAM PEMILIHAN PAMONG

Selama era reformasi, Desa Pulungsari menyelenggarakan pemilihan pamong yang meliputi carik BPD, carik desa, kepala dusun, dan lurah. Pemilihan carik BPD ini dilakukan oleh anggota BPD (12 orang) dan unsur pemerintah desa (22 orang) yang terdiri atas seorang lurah, 5 orang kepala bagian (Kabag), dan 16 kepala

dusun. Sebelum pemilihan berlangsung pada tanggal 26 Juni 2002, pemerintah desa sebagai penyelenggara pemilihan melakukan sosialisasi dusun selama 7 hari. Sosialisasi yang pendek itu memang dimanfaatkan oleh para elite yang memiliki jaringan sosial dengan para pamong. Hal ini terlihat dari identitas para bakal calon, yaitu Aminah, seorang istri pengusaha dan duduk sebagai sekretaris BPD, Asikin seorang pamong desa, dan Rudi adalah anak elite desa dan bekerja tidak tetap di swasta.

Di mata warga, Aminah, Asikin, dan Rudi bukan elite yang kredibel dalam arti merupakan tokoh teladan sehingga tidak didukung warga. Ketiga calon itu sebenarnya mengincar jabatan sekretaris BPD agar mendapat gaji tanah bengkok 3.000 m². Oleh karena tidak kredibel, para calon memainkan *glembuk*. Suami Aminah yang relatif kaya dengan bekerja sebagai pengusaha ikut menyponsori Aminah. Langkah awal Aminah adalah membujuk 4 orang anggota BPD yang tinggal di dusunnya. Aminah datang ke rumah anggota BPD tersebut dan menyampaikan niat untuk duduk sebagai sekretaris dan membisikan janji bahwa ia akan memberi imbalan Rp 500.000,00 per suara kepada siapa pun yang memberikan suara kepadanya. Imbalan itu sepadan dengan biaya administrasi yang pernah dikeluarkan oleh setiap calon anggota BPD ketika mengikuti pemilihan. *Glembuk* itu disambut positif sehingga Aminah melakukan aksi *glembuk* lagi kepada para kepala dusun.

Di saat Aminah bergerilya, Asikin juga mencari dukungan dari kalangan anggota BPD dan pamong, tetapi dengan *glembuk* yang lebih halus, dalam arti menjanjikan tali kasih bila dapat memenangkan pemilihan. Asikin mengunjungi para kepala dusun dan anggota BPD di rumahnya. Sesuai dengan adat istiadat kalau menebar *glembuk*, Asikin mula-mula menyampaikan niatnya berkunjung adalah untuk silaturahmi. Di tengah suasana beramah tamah, Asikin menyampaikan *glembuk* dengan cara memohon doa restu dan dukungannya dalam bentuk memberikan suara dalam pemilihan sekretaris BPD. Asikin memperoleh jawaban bahwa para pamong dan anggota BPD akan memberikan dukungan kepadanya. Dalam melancarkan

glembuk tersebut, Asikin juga menjanjikan bahwa kelak kalau dapat lolos menjadi carik BPD akan syukuran dan kata syukuran ini menandakan bahwa ia akan memberikan imbalan tali kasih. Para pamong dan anggota BPD menangkap maksud dari syukuran itu tanpa menanyakan bentuknya, tetapi membayangkan bahwa Asikin akan memberikan imbalan barang atau uang. Sikap seperti itu muncul karena antara Asikin dan para pamong dan anggota BPD sudah saling paham bahwa konsekuensi dari setiap bantuan suara harus dibalas dengan imbalan yang pantas. Dengan *glembuk* tersebut, Asikin memperoleh dukungan dari 2 orang pamong, 6 anggota BPD, dan 10 kepala dusun sehingga dengan angka sebanyak itu ia akan menang.

Berbeda dengan Asikin, Rudi tidak melancarkan *glembuk* langsung ke para pamong dan anggota BPD. Ia hanya berbekal dukungan dari seorang anggota BPD yang masih merupakan kerabatnya. Ia menyadari bahwa akan kalah karena tidak mempunyai uang yang memadai untuk melancarkan aksi *glembuk* seperti yang dilakukan Asikin.

Oleh karena dikerjakan sangat rapi, praktik *glembuk* uang Aminah tidak terdeteksi Asikin dan Rudi pada saat pemilihan berlangsung. Proses pemilihan digelar dengan didahului presentasi para calon untuk menyampaikan visi, misi, dan rencana kerjanya. Ketiga calon itu menyampaikan presentasi yang relatif sama. Semua berniat untuk mengabdikan kepada desa dan siap menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Usai presentasi, pemilihan dilakukan dan ketika proses penghitungan suara berlangsung, Asikin yakin kalah karena kelihatan sekali angka suara untuk Aminah membumbung, tetapi Asikin mulai curiga bahwa kartu suara untuk Aminah dicoblos dengan pola yang beragam, ada yang diletakan di sisi atas, bawah, tengah, kiri atau kanan. Aminah mendapatkan 20 suara, sedangkan Asikin 10 suara, Rudi 1 suara, dan 1 suara abstain.

Asikin merasa kecolongan dan ia menyerah kalah. Akan tetapi, dua pamong pendukungnya marah dan melacak kemenangan Aminah. Akhirnya, rahasia terbongkar juga karena pendukung Asikin tersebut berhasil merayu Kepala Dusun

Bendosari dan Giriarum yang pernah berjanji memilih Asikin untuk menyatakan sebenarnya. Dua kepala dusun kemudian mengakui bahwa telah memilih Aminah karena teperdaya oleh *glembuk* uang Aminah. Atas pengakuan tersebut, tim sukses Asikin lalu protes ke panitia. Namun kasus itu baru mengemuka usai berita acara pemilihan disahkan sehingga sulit bagi tim sukses Asikin untuk menuntut pembatalan. Bahkan, para pamong juga mengajak berdamai agar tidak menimbulkan aib bagi BPD dan pemerintah di mata warga. Asikin lalu menerima perdamaian itu. Akan tetapi, tiga orang anggota FOKUS mendesak agar kasus suap itu diselesaikan secara hukum karena melanggar amanah reformasi desa. FOKUS lalu menyebarkan kasus suap itu ke warga dan beberapa puluh tokoh warga siap melakukan demonstrasi pelengseran terhadap carik BPD. FOKUS menganggap bahwa suap tersebut sebagai tindakan yang melecehkan suara warga dan melanggar demokrasi. Namun, enam orang anggota FOKUS lainnya hanya mengajukan peringatan keras kepada pamong dan BPD, yaitu agar minta maaf ke warga dan tidak mengulangnya. Akhirnya, FOKUS sepakat untuk melakukan rekonsiliasi dengan menutup kasus itu sebagai pelajaran pahit bagi pamong dan BPD.

Kasus suap dalam pemilihan carik BPD di atas membuat pemilihan carik desa berjalan memanas dan para elite bersama tokoh warga yang kecewa lalu ikut mengawasi jalannya pemilihan carik desa pada tanggal 14 Juli 2002. Calon carik desa yang tampil ada tiga orang, yaitu Endah, istri seorang pengusaha; Suhendro seorang sarjana dengan status penganggur; dan Adi, pegawai sekolah swasta.

Dalam merebut pengaruh, kubu Suhendro dan Adi menebar *glembuk* ke warga dengan cara membangun opini publik bahwa sebaiknya calon pamong dari kalangan terdidik agar dapat bekerja dengan baik. Karena pendidikannya hanya tamat SMP, Endah atas dukungan suaminya, pengusaha angkutan, lalu mengeluarkan *glembuk* bantuan yang dimaknainya sebagai tali kasih ke warga. Ia menyediakan sekitar Rp 60.000.000,00

kepada warga dalam perkumpulan RT untuk dana pembangunan.

Suhendro mengetahui bahwa Endah memiliki dana politik yang besar dan Suhendro pun mengimbangi, tetapi hanya mampu menyediakan uang sekitar Rp15.000.000,00. Adi juga berharap dapat memainkan *glembuk* bantuan, tetapi dananya hanya sekitar Rp5.000.000,00. Karena kecil, uang tersebut diserahkan ke beberapa kampung untuk *selamatan* menjelang hari pemilihan. Langkah Adi itu mendapat apresiasi kawannya, tetapi tidak memikat kebanyakan warga menerima bantuan dari Endah.

Endah tampil sebagai pemenang karena menampilkan *glembuk* bantuan yang memikat warga. Ia mendapatkan suara sebanyak 4.500 suara (50,3%), sedangkan Suhendro meraih 3.523 suara (39,1%), dan Adi 938 suara (10,6%). Warga tidak peduli dengan pendidikan Endah yang rendah dan umumnya selalu menuntut setiap calon pamong harus memiliki kepedulian untuk mendukung pembangunan di setiap RT. Dengan dukungan beberapa pamong, tim sukses Endah berhasil melancarkan *glembuk* bantuan yang juga diterima warga sebagai tali kasih. Salah satu contoh kesuksesan penggunaan strategi tersebut terjadi di Dusun Sindetan.

Jumanto, Kabag Ekobang Desa menceritakan kemenangan Endah di Dusun Sindetan. Sebulan sebelum pemilihan carik digelar, tim sukses Endah mengunjunginya dan memohon doa restu dan dukungan. Jumanto menerima permohonan itu dengan senang karena dihargai sebagai pamong. Tim sukses lalu menanyakan apakah boleh meminta tolong Jumanto untuk menyebarkan bantuan ke warga agar warga menghargai niat baik Endah sebagai calon carik. Jumanto membolehkan karena ia mengetahui belum ada calon carik yang sudah mendahului untuk menyebarkan bantuan. Tim sukses lalu melanjutkan permintaan agar Jumanto ikut menyebarkan bantuan tersebut sehingga mudah mengetahui kelompok warga mana yang mau menerima dan menolak. Jumanto mengatakan bahwa ia dapat menghubungi tiga RT karena kelompok ini berada dalam kampungnya. Tim sukses menjanjikan imbalan sekeadarnya baik kepada Jumanto atau

ketua RT. Jumanto pun menerima tawaran tersebut. Jumanto yang kenal baik dengan tabiat warga kampungnya yang dipastikan akan suka menerima bantuan kalau dimusyawarahkan. Jumanto lalu menemui para ketua RT dan menjelaskan bahwa Endah bermaksud akan memberikan bantuan sebagai niat baik. Bantuan itu dikatakan bersifat sukarela. Para ketua RT menyambut baik karena dana bantuan itu akan dipakai untuk menambah aset perkumpulan. Para ketua RT lalu membujuk para anggotanya mengenai pentingnya bantuan bagi aset RT. Para warga senang atas munculnya bantuan karena tidak memiliki preferensi tentang calon carik yang disukai. Para ketua RT dan warga merumuskan bentuk bantuan, ada yang meminta tenda, barang pecah belah, dan alat pertemuan seperti meja dan kursi plastik. Setelah itu, para ketua RT menyampaikan daftar permintaan bantuan ke Jumanto, yang nilainya sekitar Rp 2.000.000,00. Daftar tersebut diserahkan kepada tim sukses, lalu tim sukses belanja ke pasar dan menyerahkan bantuan tersebut. Pada menjelang hari pemilihan, para ketua RT mengingatkan kepada warga agar membalas jasa atas bantuan yang diberikan Endah.

Keberhasilan *glembuk* bantuan di atas karena bantuan tersebut sesuai dengan aspirasi warga dan diberikan secara kolektif sehingga tidak memecah belah-warga dan warga seperti-nya diberi kebebasan untuk menentukan sikap memilih. Dengan memakai taktik seperti itu, suara warga akan memihak kepada calon carik Endah, dan dalam istilah lokal disebut *ngeblok* (memihak) kepada dirinya sehingga tidak menimbulkan perselisihan antarwarga (*blok-blok*). Praktik *glembuk* seperti itu memungkinkan bahwa bantuan (*gift*) bukan memecah belah tetapi justru memperkuat solidaritas komunitas (Komte, 2005: 87). Warga merasa tidak salah kalau memanfaatkan bantuan sebagai sebuah resiprositas. Dengan demikian, *glembuk* bantuan tersebut merupakan strategi elite yang bergayung sambut dengan nalar resiprositas dalam kehidupan warga di komunitas.

Kemenangan Endah juga memakai *glembuk* uang, tetapi *glembuk* ini dipahami warga sebagai suap yang maknanya membeli suara sehingga

dilawannya. Tim sukses Endah kurang percaya akan meraih kemenangan dengan sekadar memakai *glembuk* bantuan. Tim Endah lalu menjalankan *glembuk* uang di sebuah RT di Dusun Kayumanis. Warga terpecah antara kelompok yang pro bantuan bagi kepentingan RT dan menolak karena menjadi pendukung utama kelompok Suhendro. Tim Endah nekat memberikan uang sebesar Rp 10.000,00 per orang pada pagi hari menjelang pemilihan berlangsung dengan diperhalus dengan istilah sumbangan ikut pemilihan carik. Akan tetapi, dari sekitar 20-an warga yang menerima, tiga di antaranya melaporkan ke anggota FOKUS ketika usai penghitungan suara. Ketiga orang tersebut memang menjadi pendukung Suhendro. FOKUS dan ketua BPD lalu mendesak agar panitia mengusut serta membatalkan hasil pemilihan. Lurah marah atas desakan tersebut karena kalau sampai dilaksanakan, lurah akan disebut sebagai pemimpin yang gagal menjalankan tugas. Lurah mengeluarkan jurus *glembuk* guna meyakinkan ketua BPD bahwa langkah pembatalan akan memperkeruh konflik politik desa. Lurah mengatakan kalau pihak panitia selalu merespons laporan adanya politik uang yang disampaikan oknum, nanti tidak pernah akan ada keputusan siapa pemenangnya; besok kalau ada pemilihan lagi juga akan gagal karena akan ada orang yang mengklaim menerima uang. Jalan tengah yang diajukan lurah adalah para pelapor diminta membuat pernyataan bermeterai. *Glembuk* lurah tersebut diterima BPD dan tiga pelapor tidak berani membuat pernyataan karena takut digugat tim sukses Endah.

Munculnya *glembuk* uang dalam pemilihan carik BPD dan carik desa memicu ketidakpercayaan FOKUS terhadap pemerintah desa. FOKUS bersama elite desa dan tokoh warga di wilayah barat menggelar gerakan pemecahan desa karena jika *glembuk* uang terus berlanjut, pejabat desa di Pulungsari akan diisi oleh elite timur yang bermodal KKN. Tuntutan FOKUS adalah desa dibagi menjadi dua desa, yaitu Desa Pucangan yang menguasai wilayah timur dan Desa Pulungsari yang menguasai wilayah barat. FOKUS mengirim surat kepada pemerintah desa,

Pemda, DPRD, dan DPR. Isi surat mendesak agar Pemda memberikan hak bagi warga di Pulungsari barat untuk membentuk desa sendiri dengan alasan demi meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Gerakan pemecahan desa tidak bergulir sejak tahun 2004 setelah Bupati Adham menengahi dengan mengajak para elite barat mengalah dan berjuang memajukan desanya. Walaupun demikian, peristiwa ini tetap menimbulkan gesekan politik. Di satu sisi Lurah Sujiwo tidak berani melangkah mencalonkan lagi untuk lurah periode 2005-2013 karena warga dari wilayah barat resisten terhadap munculnya pejabat baru dari timur dan di sisi lain warga dari wilayah timur menyikapi gerakan pemecahan desa sebagai tindakan kasar yang menghalang untuk tidak menjagokan calon lurah dari kampungnya.

Kasus pemilihan carik BPD dan carik desa yang sarat dengan *glembuk* uang mempengaruhi proses pemilihan kepala dusun di Pundung, Nogosari, Sindetan, dan Giriarum. Para tokoh warga dan warga mencegah jangan sampai muncul *glembuk* uang (politik uang) dalam pemilihan kepala dusun agar tidak menimbulkan perpecahan warga. Para tokoh warga masih menerima *glembuk* bantuan karena sebagai suatu bentuk tali kasih, tetapi mendesak agar bantuan diberikan setelah pemilihan usai dilaksanakan agar tidak menjadi alat utama memenangkan pemilihan. Para tokoh warga di Giriarum bahkan memutuskan bahwa bantuan pun hanya diberikan oleh seorang calon yang menang sebesar Rp750.000,00 per RT untuk dana pembangunan. Gunawan, seorang tokoh warga, menyampaikan kekawatiran politik uang dan bantuan dalam pemilihan kepala dusun.

Setelah geger kasus suap carik BPD, dan munculnya gerakan pemecahan desa, warga tidak mau kecolongan. Kalau sampai terjadi politik uang, warga bisa pecah. Pemenangnya pasti yang mempunyai uang banyak dan diprotes oleh lawannya. Para tokoh warga lalu musyawarah, membuat aturan dan aturan itu dilaksanakan. Ketika pemilihan kepala dusun digelar pada tanggal 26 Desember 2004, para

calon tidak boleh menjamu tamu (*nyuguh*) di rumahnya sehingga tidak bisa memamerkan hidangan. Para tokoh warga sepakat, lebih baik uang dihemat agar calon yang menang bisa menyumbangkan uangnya untuk seluruh RT.

Secara umum, pemilihan empat kepala dusun menggambarkan upaya warga melawan *glembuk* uang dan bantuan demi memenangkan tokoh yang paling kredibel di kampungnya. Jika disimak lebih lanjut, walaupun para calon memiliki kredibilitas, tetapi masih menggunakan kekuatan *glembuk* agar kredibilitas itu berfungsi untuk meraih dukungan suara. Hal ini dapat dilihat dalam kasus pemilihan di Dusun Nogosari yang dimenangkan Barkoni, seorang tokoh warga, mengalahkan tiga calon lain dari elite desa.

Pada pemilihan putaran I, Barkoni meraih 281 suara (31 %) menyisihkan Suwarni 263 suara (29 %), Maryono 191 suara (21%), dan Dumeri 173 suara (19 %). Sesuai dengan peraturan, karena suara Barkoni kurang dari 30 %, dilakukan pemilihan putaran II. Dalam pemilihan putaran I, setiap calon mendapat dukungan dari warga RT-nya masing-masing sebagai ekspresi dari solidaritas komunitas. Akan tetapi, karena dikenal sebagai pemuda yang luas pergaulannya, Barkoni mampu meraih suara dari luar RT-nya. Barkoni juga mendapat dukungan dari warga yang tidak suka terhadap Maryono yang kurang aktif dalam kegiatan sosial dan tidak menerima Dumeri yang masih kerabat dari carik Karman yang dilengserkan 1998. Saingan Barkoni yang sesungguhnya adalah Suwarni, istri seorang pedagang yang dikenal luas pergaulannya di desa. Dalam pemilihan putaran II ini, tim sukses Barkoni menebarkan *glembuk* kepada para mantan pemilih Mahyono dan Dumeri secara personal dan halus agar tidak memilih Suwarni dengan menghembuskan isu gender. Tim sukses mengingatkan bahwa sebaiknya memilih Barkoni karena pengalaman menunjukkan bahwa kepala dusun perempuan tidak dapat menemani kegiatan gotong royong dan rapat sampai larut malam. *Glembuk* itu mengena karena umumnya warga mengetahui bahwa kepala dusun perempuan di Pulungsari memang tidak dapat

aktif mengikuti kegiatan warga sehingga akhirnya Suwami kalah.

Penggunaan *glembuk* sebagai alat untuk meraih dukungan warga secara lebih maksimal di kalangan tokoh yang relatif sudah kredibel lebih tampak dalam pemilihan di Giriarum. Ada empat orang calon dan persaingan berlangsung ketat sehingga terseleksi dua orang yang harus mengikuti pemilihan II, yaitu Amrullah dan Waluyo, dan suara terbanyak diraih oleh Amrullah yang meraih 58,11 %, sedangkan Waluyo 41,9 %. Dua orang ini mempunyai kredibilitas yang berbeda. Amrullah dikenal sebagai anak tokoh Muhammadiyah yang hidup di komunitas nahdliyin, tetapi sangat besar jasanya bagi kemajuan pendidikan orang Giriarum. Adapun Waluyo memiliki kredibilitas dari sisi jasanya sebagai tukang yang sering merekrut tetangganya bekerja di kota. Kredibilitas ternyata dipentaskan oleh tim Amrullah dengan melancarkan *glembuk*.

Usai kampanye bersama, tim sukses Amrullah yang diwakili Kasan Hadi, mengajak semua kontestan tidak melakukan kampanye ke setiap warga, demi menjaga suasana tenang dan damai. Kasan Hadi mengingatkan warga pasti akan memilih calon sesuai dengan hati nuraninya. Semua kontestan setuju, tetapi tim sukses Amrullah justru kampanye ke rumah-rumah secara diam-diam dengan cara mengingatkan jasa orang tua Amrullah. Pamer itu terutama disampaikan kepada pemuda yang kurang mengetahuinya. Berkat ayah Amrullah itu orang Giriarum terdidik sehingga bisa menjadi guru dan PNS di Departemen Agama. Para pemuda diingatkan untuk membalas budi atas kebaikan ayah Amrullah. Kasan Hadi menceritakan bahwa ayah Amrullah bersama dengan keluarga Kyai Marzuki adalah pendiri madrasah tahun 1956 dan tsanawiyah tahun 1968. Ayah Amrullah mengajar bertahun-tahun tanpa menerima honorarium, bahkan masih mengeluarkan uang untuk ikut membangun gedung. Setelah sekolah itu dinegerikan, ayah Amrullah juga tidak memiliki anggota keluarga yang bekerja di sekolah tersebut. *Glembuk* tersebut memikat pemuda sehingga wajar Amrullah mendapatkan suara yang besar. Adapun pada pemilihan putaran II, tim Amrullah juga secara diam-diam mendekati warga yang

pada putaran I yang memilih Basiran dan Nur Ahmadi dengan bujukan agar memilih calon yang paling "rendah dosanya" kepada rakyat. Kampanye ini dibisikkan karena keluarga Amrullah belum memiliki cacatan buruk di hadapan warganya.

Pemilihan carik dan kepala dusun menunjukkan bahwa elite desa harus memiliki strategi *glembuk* yang jitu untuk meningkatkan kredibilitasnya. Warga semakin kritis terhadap aksi *glembuk* elite yang dianggap melukai martabat dan merusak solidaritas komunitas. Bahkan, warga masih dapat menekan masuknya elite yang tidak kredibel. Akan tetapi, tokoh yang kredibel pun tidak serta merta dapat meraih jabatan karena harus memolesnya dengan melakukan aksi *glembuk* agar warga menjadi yakin dan terpesona.

GLEMBUK DALAM PEMILIHAN LURAH

Gerakan pemecahan desa yang dimotori elite Pulungsari wilayah barat sebagai protes atas kemenangan para elite wilayah timur dalam pemilihan carik BPD dan carik desa mempengaruhi proses pemilihan lurah. Gerakan ini membuat elite wilayah timur enggan ikut pemilihan lurah. Kalau menang, dapat dituduh main politik uang, tetapi kalau kalah tetap mengeluarkan uang untuk minimal membiayai *glembuk* bantuan. Tekanan itu membuat elite di wilayah barat berada di atas angin, dan sepakat menjagokan Maruta, yang berminat mencalonkan diri. Masalahnya adalah Maruta merupakan anak Martondo, seorang mantan lurah (1983-1995) yang tidak populer di mata warga karena dalam memimpin desa, menggerakkan pembangunan dan memenangkan Golkar sering menggunakan *glembuk* kasar. Selain itu, Maruta yang juga tidak menunjukkan sosok yang kredibel sebagai anak muda. Ia aktif di karang taruna tingkat kecamatan tetapi itu pun tidak kelihatan prestasinya bagi kepentingan pemuda di desa. Sementara itu, Maruta harus menghadapi kotak kosong karena ia hanya calon tunggal dan harus dapat mendapatkan dukungan suara dari warga di wilayah timur yang kecewa tidak memiliki calon

lurah sebagai imbas dari gerakan pemecahan desa.

Atas rendahnya kredibilitas Maruta tersebut, tim sukses lalu mencari akal untuk melancarkan *glembuk* agar dapat mempesona para warga tidak terkecuali warga di wilayah timur. Dalam melakukan kampanye ke setiap dusun, tim sukses menampilkan tiga macam *glembuk*, pertama *glembuk* untuk menepis keraguan warga atas rendahnya kredibilitas Maruta, memberikan kompensasi suara warga, dan mengangkat aspirasi warga dalam pembangunan. Di Dusun Kayumanis, Giriarum, dan Karangsari, misalnya, Lambang kampanye di hadapan sekitar 20 orang tokoh warga dan meyakinkan bahwa Maruta adalah pemimpinnya. Lambang mengatakan "Maruta itu tidak seperti ayahnya dan kalau sampai seperti ayahnya, saya yang akan melengserkan lebih dulu karena ketika ayahnya otoritarian pun saya juga berani melawannya".

Para tokoh warga semakin mantap ketika Lambang dan kawan-kawannya mengatakan bahwa Maruta tidak akan main politik uang. Lambang mengatakan "Maruta tidak akan membagikan uang, tetapi akan memberikan bantuan kepada setiap RT sebesar Rp 300.000,00 sebagai syukuran bila kelak dapat memangku jabatan sebagai lurah". Para tokoh menerima *glembuk* bantuan sebab dengan diberikan pasca pemilihan, tidak dianggap pamer dan memaksa warga untuk memilihnya.

Umumnya, tokoh warga juga dapat menerima setelah Maruta beramah tamah dan mendengarkan aspirasinya. Intinya warga menghendaki agar pembangunan desa dikonsetrasikan di dusun atau RT dan pelaksanaannya adalah bersifat swakelola warga. Oleh karena itu, Maruta dalam pidatonya selama 15 menit di setiap dusun menyampaikan pesan bahwa ia akan menggerakkan pembangunan berbasis komunitas dan membina kaum muda agar lebih aktif berorganisasi. Ia berjanji akan selalu memperhatikan aspirasi warga dalam membangun desa. *Glembuk* tersebut dapat melahirkan dukungan para tokoh warga sehingga mengajak para tetangga untuk memilihnya.

Pada tanggal 26 Desember 2004, pemilihan lurah digelar dan hasilnya mencatat bahwa warga memang cenderung memilih Maruta, sekalipun cukup banyak warga yang tidak dapat dibuai dengan *glembuk* bantuan dan janji politiknya. Hal ini karena angka golongan putih (*golput*) mencapai 2.930 suara (25,7 %) dari 11.390 total pemilih. Angka ini sangat besar dibandingkan dengan pemilihan kepala dusun yang hanya berkisar antara 5-10 %. Selain bersikap *golput*, cukup banyak warga yang memilih kotak kosong. Maruta hanya memperoleh 5.563 suara (67,2 %) lawan 2.639 suara kotak kosong (32,8%). Di wilayah barat, Maruta meraih 75 % atau 3.731 suara dari 4.975 suara sah, tetapi di wilayah timur, ia hanya meraih 57 % atau 2.394 suara dari 3.226 suara sah. Banyaknya suara *golput* dan kotak kosong merupakan kesadaran para warga untuk menolak Maruta yang dianggap kurang kredibel. Warga di timur lebih resisten karena merasa diakali oleh elite barat untuk tidak memiliki calon dari komunitasnya melalui gerakan pemecahan desa.

Warga yang bersikap *golput* terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang tetap memilih tidak pulang di perantauan dan memilih bekerja di luar desa (*glidig*). Para perantau merasa bahwa pemilihan lurah dengan calon tunggal Maruta tidak sesuai dengan aspirasinya. Selain itu, sebagian kecil perantau kurang percaya dengan *glembuk* Maruta yang terkesan sebagai tebar pesona, yakni mencari dukungan dengan mengobral janji. Warga yang memilih *glidig* sebenarnya sudah dihubungi oleh ketua RT agar mendukung Maruta sesuai dengan kesepakatan dengan tim sukses pascakampanye di dusun. Ketua RT 1 Dusun Denggung, misalnya, mengajak warganya untuk memilih Maruta, tetapi Danuri langsung menyahut "Pak maaf besok saya akan *glidig*, jadi saya mohon pamit biar istri saya saja yang datang ke TPS". Sikap Danuri seperti itu diikuti oleh kawannya.

Kemenangan Maruta memperjelas pentingnya *glembuk* untuk menyiasati kelemahannya yang belum kredibel sebagai calon pemimpin. Dengan demikian, kredibilitas seperti dimilikinya

sifat keteladanan sebagaimana dikonsepsikan oleh Taven (2006:3) dan memang sebuah syarat untuk mendapatkan pengaruh, tetapi masih dapat diganti dengan *glembuk* transaksional meskipun tidak akan mendapatkan dukungan warga secara mutlak. Sementara itu, memang benar kredibilitas elite dapat diraih dengan menjalankan janji politiknya dan mampu mengatasi krisis yang dialami warganya (Menon, 2007:1). Pandangan para ahli tersebut terlihat dalam kepemimpinan Maruta ketika menjabat sebagai lurah. Maruta dapat naik kredibilitasnya dengan cara sering melakukan *glembuk* seperti menggelontorkan proyek ke warga yang resisten dengan kepemimpinannya dan melobi pejabat untuk menggelontorkan proyek pada masa krisis ekonomi sebagai dampak dari bencana alam tahun 2006.

SIMPULAN

Artikel ini menggambarkan kekuatan kredibilitas dan *glembuk* sebagai alat untuk meraih kredibilitas guna mendapatkan dukungan politik dari warganya atau alat yang dipakai untuk sekedar mengontrol warga tanpa legitimasi. Kredibilitas terbukti menjadi prasyarat bagi elite untuk meraih jabatan politik di desa. Hampir semua elite yang rendah kredibilitasnya akan mengalami kesulitan untuk meraih dukungan suara warga dalam rekrutmen pejabat desa. Eforia reformasi bahkan telah mendorong warga untuk melengserkan elite yang tidak kredibel dan melahirkan elite yang kredibel melalui rekrutmen secara demokratis.

Meskipun kredibilitas menjadi prasyarat untuk meraih jabatan politik, ternyata umumnya elite tidak memiliki prasyarat tersebut secara memadai. Dengan kredibilitas yang sudah memadai sekalipun, para elite harus bersaing untuk memperebutkan dukungan suara warga. Oleh karena itu, jalan keluar yang ditempuh para elite adalah mendayagunakan *glembuk* sebagai strategi yang sudah mentradisi dalam kehidupan politik di desa. *Glembuk* menjadi alat yang negosiatif bagi elite dalam mendorong warga agar menerima ajakan politiknya atau menjerat warga agar terpedaya.

Dalam perebutan jabatan di desa, elite mengandalkan *glembuk* bantuan sebagai suatu politik transaksional. *Glembuk* ini lebih diterima warga daripada *glembuk* uang. Sekalipun bersifat transaksional yang mengandung makna politik uang, *glembuk* bantuan merupakan pertukaran yang diterima secara sosial dan bernilai secara kultural. *Glembuk* bantuan dapat disejajarkan dengan konsep tali kasih dan resiprositas sebanding yang tidak merendahkan warga dan tetap menjaga harmoni komunitas sehingga tidak memecah belah warga. Sebaliknya, *glembuk* uang dianggap sebagai tindakan suap atau jual-beli suara yang dinilai sebagai tindakan kasar terhadap warga.

Artikel ini juga menunjukkan bahwa permainan *glembuk* di Pulungsari kiranya dapat menjelaskan dinamika politik di desa lainnya. Hal ini karena politik di Pulungsari sarat dengan persaingan kekuasaan antarelite dengan memainkan kekuatan *glembuk*. Ketika para elite tersebut mengeluarkan *glembuk* kasar untuk mempertahankan kekuasaan atau merebut jabatan akan muncul resistensi dari kalangan warga. Oleh karena itu, wajar mengapa banyak elite desa di Jawa pada masa reformasi, dilengserkan atau ditekan oleh warganya, bukan semata karena rendah kredibilitasnya, tetapi karena terutama melancarkan *glembuk* kasar.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Fachry. 1986. *Refleksi Paham "Kekuasaan" Jawa dalam Indonesia Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Anderson, Benedict R.O.G. 1972. *The Idea of Power in Javanese Culture*. Cornell: Cornell University Press.
- Antlov, Hans. 2002. *Negara dalam Desa, Patronase Kepemimpinan Lokal*. Yogyakarta: Lappera.
- . 2003. "Not Enough Politics! Power, Participation and the New Democratic Polity in Indonesia", dalam Edward Asinall dan Greg Fealy, eds. *Local Power, and Politics in Indonesia, Decentralization & Democratization*. Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, hal.72-87.
- Bernas, 12 Februari 2001, "Kades dan Sekdes Tursino Kembalikan "Uang Panas", Daripada Mati Dikeroyok Warganya".

- Bernas, 14 Juli 2000, "Takut Didemo Warga, 460 Kades Minta Perlindungan Bupati dan Golkar Kebumen".
- Budijanto, Bambang. 2001. "Interaksi Antar Pemerintah Atas Desa dan Kekuatan Politik Lokal di Desa Lopait". *Renai* 1(2): 94-102.
- Cahyono, Heru et. al. 2005. *Konflik Elite Politik di Pedesaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Cederroth, Sven. 1994. "New Order Modernization and Islam Village Officials and Religious Teachers". dalam Hans Antlov dan Sven Cederroth, eds. *Leadership on Java*. Richmond: Curson. hal. 137-162.
- D & R, 18 Juli 1998, "Musim Gugur' Kepala Desa Tiba". <http://jurnalis.wordpress.com>
- Husken, Frans. 1998. *Masyarakat Desa dalam Perubahan. Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980*. Jakarta: Grasindo.
- Jawa Post*, 24 Januari 2003, "Jalan Rusak, Kades Diteror".
- Kedaulatan Rakyat*, 15 Juni 2002, "Pemberian Uang Saku dalam Pilkades Dilarang"
- Kedaulatan Rakyat*, 18 Juni 2002, "Panitia BPD Nyatakan Belum Sah: Pilrudes Dengok Diprotes Warga".
- Kedaulatan Rakyat*, 21 Juni 2002, "Rumah Panitia Pilrudes Dengok Diamankan: Masyarakat Menuntut Pemilihan Ulang".
- Kedaulatan Rakyat*, 27 Juni 2002, "Kecurangan Pilrudes Dengok Diusut"
- Kedaulatan Rakyat*, 29 April 2002, "Pemilihan Kepala Desa Semangak Ricuh, Balai Desa Rusak".
- Kompas*, 8 Januari 2004, "Tidak Puas Pembagian Bantuan, Warga Bakar Kantor Desa".
- Komter, Aafke E. 2005. *Social Solidarity and the Gift*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Latief, Syahbudin. M. 2001. "BPD, DPRK, dan DPRK-GR: Legitimasi Kekuasaan Elite Lokal dalam Perubahan Sosial". *Renai* 1(2): 93-102.
- Maurer, Jean-Luc. 1996. "Pamong Desa or Raja Desa", dalam Hans Antlov dan Sven Cederroth, eds. *Leadership on Java*. Richmond: Curson. hal. 97-119.
- Menon, Pavarthi. 2007. "Credibility Crisis". *Frontline*, 16 November 2007, hal 1-17.
- Moedjanto, G. 1985. *The Concept of Power in Javanese Culture*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Olofsgård, Anders. 2001. "The Political Economy of Reform: Institutional Change as a Tool for Political Credibility". *Working Paper*. The Economics Department and Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Georgetown
- Smith, Theodore, M. 1984. "Kepala Desa: Pelopor Pembaharuan?", dalam Koentjaraningrat, ed., *Masalah-Masalah Pembangunan. Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Jakarta: LP3ES, hal. 197-213.
- Tacho, Junji. 2009. *Political Corruption and Governmental Credibility in Japan*. Tokyo: The Asahi Shimbun Publishing.
- Taven, Jason J. 2006. "Relationships with Believability, Likeability, and Deceptiveness". *Human Communication*. 11(4): 383-400.
- Tempo Interaktif*, 14 November 2006, "Sebanyak 24 Kepala Desa di Jawa Tengah dipenjara karena terlibat kasus korupsi".
- Tjiptoherijanto, Prijono dan Yumiko M. Prijono. 1985. *Demokrasi di Pedesaan*. Jakarta: SH dan LPFE-UI.
- Weber, Marx. 1968. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, New York, Bedminster Press.
- White, Ben dan Gutomo Bayu Aji. 2001. "The Changing Character of Local Politics: Notes on a Village in Yogyakarta from Independence to Reformasi", *Renai* 3 (4):12-27.
- Widodo. 2007. *Kamus Basa Jawa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wikipedia. 2010. "The Credibility Gap", dalam *Wikipedia, the free encyclopedia*. www.Wikipedia.Com.